



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Kamis 24 April 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Komisi C DPRD Sidoarjo Dukung Pembangunan RSUD Sedati

Fasilitas Kesehatan Warga Wilayah Timur dan Utara

Sidoarjo. Memorandum Pembak Sidoarjo bakal membangun RSUD di Sedati. Pertengahan tahun ini fisik RSUD baru itu bakal digarap dan diperkirakan tuntas akhir tahun ini juga.

Pembangunan RSUD Sedati ini mendapat dukungan dari Komisi C DPRD Sidoarjo. "Bukan hanya kita dukung, tetapi juga kita kawal agar proyek pembangunan RSUD Sedati sesuai rencana dan tidak molor," ujar Ketua Komisi C H Choirul Hidayat.

Mantan Kepala Desa (Kades) Lebo itu menyebutkan, pembangunan RSUD Sedati harus didukung untuk melayani kesehatan warga di kawasan utara dan timur Sidoarjo. Setelah beroperasi, warga di kawasan itu diharapkan tidak perlu jauh-jauh lagi apabila membutuhkan pelayanan kesehatan.

Agar pembangunan tidak serampangan, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, Komisi C akan mengawasinya. Pembangunannya tidak boleh melenceng dari rencana dan sesuai yang sudah ditentukan pemkab. "Kita akan kawal mulai awal hingga



Ketua Komisi C H Choirul Hidayat.



Wakil Ketua Komisi C H Anang Siswandoko.

akhir agar sesuai rencana," tegas Choirul Hidayat.

Choirul Hidayat juga memaparkan dewan juga mendukung penganggaran pembangunan RSUD Sedati Rp 60 miliar melalui dinas kesehatan dari APBD Sidoarjo. Sebab pada prinsipnya wakil rakyat selalu mendukung pembangunan untuk rakyat.

Dukungan pembangunan RSUD Sedati juga datang dari Wakil Ketua Komisi C H Anang Siswandoko. Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, pembangunan RSUD Sedati jelas didukung dewan karena tujuannya untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan bagi warga.

Sebelumnya, kata Anang Siswandoko, Pembak Sidoarjo sudah menuntaskan pembangunan RSUD Krian yang belakangan diberi nama RSUD Sidoarjo Barat (Sibar). RSUD Sibar melengkapi RSUD Sidoarjo yang lebih dulu ada dan dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan warga Sidoarjo Barat. "Sekarang kalau dibangun RSUD Sedati, ya pasti kita dukunglah. Ini semua kan

untuk warga Sidoarjo," jelas Anang Siswandoko.

Hanya saja, Anang Siswandoko mengingatkan Pembak Sidoarjo dan rekanan yang menggarap proyek RSUD Sedati itu tidak dilakukan serampangan. "Agar pembangunannya sesuai rencana, kita akan mengawal dan mengawasinya," jelasnya.

Masih kata Anang Siswandoko, pihaknya akan sidak ke lapangan saat proyek itu digarap. Bila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan memanggil para pihak terkait untuk *hearing*.

"Intinya proyek itu harus tepat dan tidak boleh melenceng. Kita akan mengawal sampai akhir," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan,



Puskesmas Sedati yang bakal berdamai dengan RSUD Sedati.

"Time schedule-nya sudah ada, jadi semuanya berjalan sesuai rencana, 2026 kita lengkapi akses dan dokter serta perawat," jelasnya.

Meskipun lahan Puskesmas Sedati digunakan untuk RSUD, layanan puskesmas tetap dipertahankan. Puskesmas Sedati nantinya akan ditokukan pada bangunan baru di sisi utara yang berdamai dengan RSUD.

Dengan lokasi yang berdamai, diharapkan ada sinergi antara layanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Hal itu cukup penting untuk meningkatkan akses layanan medis bagi warga. "Kita akan

Gedangan, Sakidono, Waru, hingga Sedati.

"Pembangunan RSUD Sedati ini akan berdampak positif, meningkatkan layanan kesehatan di Sidoarjo, dengan lokasi dan tenaga medis yang terampil masyarakat akan mendapat pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas," pungkasnya.

Kuatkan Pendidikan Agama, Bupati Dorong Sidoarjo Jadi Kota Santri

KOTA-Bupati Sidoarjo Subandi, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kota Delta sebagai kota santri. Ia menyatakan siap membangun masyarakat berkarakter Islami melalui penguatan pendidikan agama, khususnya pendidikan pesantren.

Pernyataan tersebut disampaikan Subandi saat menghadiri kegiatan halalbihalal Majelis Taklim Az-Zahra di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (23/4).

"Sidoarjo perlu memiliki identitas keislaman yang kuat, karena mayoritas warganya berlatar belakang muslim," ujarnya.

Menurut Subandi, karakter Islami masyarakat Sidoarjo telah tumbuh dan berkembang

melalui berbagai organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII. Karena itu, pendidikan pesantren perlu mendapatkan perhatian dan dukungan serius dari pemerintah.

Pembak Sidoarjo, lanjut Subandi, akan mempermudah proses perizinan bagi lembaga pendidikan pesantren agar tumbuh lebih banyak dan berkualitas.

"Langkah ini kami harapkan bisa mendorong peningkatan jumlah dan kualitas pesantren di Sidoarjo," katanya.

Tidak hanya pendidikan di pesantren, Subandi juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Ia menekankan

bahwa pembelajaran agama sangat penting dalam membentuk generasi muda yang religius dan toleran.

Ia menambahkan, semangat kota santri harus didukung oleh aktivitas pesantren yang aktif serta ketersediaan fasilitas keagamaan yang memadai. Masyarakat pun diminta untuk ikut mendukung dan menjaga kegiatan keagamaan di lingkungan masing-masing.

"Bukan hanya soal jumlah pesantren, tapi bagaimana karakter Islami yang kuat bisa tumbuh di tengah masyarakat. Itu penting agar Sidoarjo menjadi kota yang ramah, toleran, dan peduli terhadap sesama," pungkasnya. (sai/vga)



Bupati Sidoarjo Subandi.

Komisi A DPRD Sidoarjo Siap Perhatikan Nasib 52 Pembeli Rumah dan Pengembang Perumahan Griya Sono Indah

by redaksiW | 23/04/2025 | 47



Hearing dengan pihak pengembang dan penghuni Perumahan Griya Sono Indah bersama instansi terkait di Gedung Paripurna Kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (23/4/2025).

SIDOARJO (wartadigital.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo khususnya Komisi A siap memperhatikan kelanjutan kasus status tanah Perumahan Griya Sono Indah Sidokerto Buduran Sidoarjo.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H Rizza Ali Faizin MPd.I usai melakukan hearing dengan pihak pengembang dan penghuni Perumahan Griya Sono Indah bersama instansi terkait di Gedung Paripurna Kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (23/4/2025).

"Kasus ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kami agar para investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami masalah seperti ini. Kami juga akan memperhatikan para pembeli atau pemilik rumah di Griya Sono Indah untuk mendapatkan hak-haknya," ungkap Rizza.

Tersandung Persoalan Hukum, Pengembang Perumahan di Sidoarjo Mencari Keadilan ke DPRD

23 April 2025 13:13 WIB - 115 Ditilik oleh redaksi



Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin bersama Eko Budi Santoso Owner PT. Kenongo Properti memberi keterangan media

Sidoarjo, petisi.co – Merasa dirugikan atas legalitas tanah yang telah dibeli di Dusun Kianggri Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Sidoarjo, Eko Budi Santoso Owner PT. Kembang Kenongo Property menumpahkan seluruh keluh kesah yang membelenggu pikirannya di hadapan Komisi A, DPRD Sidoarjo, Selasa (22/4/2025).

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kepala Inspektorat dan Kadikbud Sidoarjo memberi semangat kepada para siswa SMPN agar bisa menjadi karakter jujur dan tidak korupsi.

Inspektorat dan Dikbud Sidoarjo akan Roadshow Anti Korupsi ke Sekolah

Sidoarjo, Bhirawa

Aksi Anti korupsi di Kabupaten Sidoarjo mulai disosialisasikan di kalangan pelajar SMP. Inspektorat dan Dikbud Sidoarjo akan melakukan road shownya. Launching program ini dibuka oleh Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, Rabu (23/4) kemarin, di Aula SMPN 2 Sidoarjo.

Sosialisasi Anti Korupsi sejak dini kepada siswa SMP tersebut di hadiri oleh seluruh kepala sekolah SMP Negeri dan ketua OSIS yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Andjar, kedepan road show ini akan dilaksanakan menyeluruh kepada seluruh lembaga pendidikan swasta di Sidoarjo.

"Sekolah negeri dan sekolah swasta akan menjadi bagian dari gerakan ini, setiap anak di Sidoarjo memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tentang pentingnya menjaga integritas" kata Andjar dalam kesempatan itu.

tas, kata Andjar, dalam kesempatan itu.

Menurut Andjar pencegahan korupsi tidak hanya pada lingkungan PNS saja, melainkan harus dimulai dari usia dini, dengan diberi pendidikan karakter, agar lebih efektif untuk mencetak generasi anti korupsi. [kus.wwn]

Dorong Sinergi Kepala Desa untuk Pembangunan Desa

SIDOARJO - Pengurus Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sidoarjo periode 2025-2029 resmi dikukuhkan oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, di Pendopo Delta Wibawa, Selasa sore (22/4/25).

Acara pengukuhan dihadiri oleh Ketua DPD PKDI Provinsi Jawa Timur, S. Mahdi, jajaran Forkopimda Sidoarjo, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo.

Pengukuhan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan dan penyerahan bendera secara simbolis dari Ketua DPD PKDI Provinsi Jawa Timur kepada Ketua DPC PKDI Kabupaten Sidoarjo terpilih, H. Budiono, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono.

PKDI dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi kepala desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah, sekaligus sebagai sarana memperkuat sinergi dalam pembangunan desa.

Bupati H. Subandi menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran



Pengukuhan pengurus PKDI) Kabupaten Sidoarjo periode 2025-2029 oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, Selasa sore (22/4/25)

pengurus PKDI yang baru dikukuhkan. Ia berharap terbentuknya PKDI dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepala desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

"Saya sebagai pimpinan daerah mengucapkan selamat atas dilantikannya pengurus PKDI Sidoarjo. Ke depan, saya berharap terjalin har-

mon-
isasi
yang

berkelanjutan antara kepala desa dan pemerintah daerah demi kemajuan pembangunan Sidoarjo," ujar Subandi.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh peran kepala desa dalam melaksanakan program-program pembangunan desa yang berpihak pada masyarakat.

"Saya akan mendukung penuh peran dan fungsi kepala desa dalam mengemban tanggung jawab terhadap masyarakat dan wilayahnya. Dengan bekerja sesuai aturan, kita pastikan setiap langkah yang diambil berpihak kepada rakyat," tambahnya.

Ketua DPD PKDI Jawa Timur, S. Mahdi, menegaskan pentingnya kepala desa bersikap loyal dan komitmen terhadap hasil keputusan rapat dewan pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Yang terpenting, seluruh kepala desa harus royal dan komitmen untuk menaati setiap kebijakan yang telah diputuskan melalui rapat dewan pimpinan, karena semuanya berlandaskan AD/ART organisasi,"

ujar Mahdi. (Duta/Red)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Subandi Lantik Ketua DPC PKDI Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pengurus Persaudaraan Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2025-2029 resmi dikukuhkan Bupati Sidoarjo Subandi di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa 22 April 2025.

Acara ini dihadiri Ketua (Dewan Perwakilan Daerah) DPD Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Provinsi Jawa Timur S Mahdi dan jajaran Forkopimda Sidoarjo dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo.

Acara pengukuhan tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah, serta penyerahan bendera sebagai simbolis oleh Ketua DPD PKDI Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PKDI Kabupaten Sidoarjo terpilih, Budiono, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono.

Bupati Sidoarjo Subandi mengucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan PKDI Sidoarjo. Diharapkan dapat terjalin sinergi yang baik antara kepala desa dan pemerintah daerah untuk bersama menjalankan program maupun kebijakan pemerintah dalam pembangunan Sidoarjo.

“Saya sebagai pimpinan daerah mengucapkan selamat atas dilantiknnya



Pengurus PKD se Kabupaten Sidoarjo H Budiono.

PKDI Sidoarjo. Ke depan saya berharap dapat membangun harmonisasi antara kepala desa dengan pemerintahan daerah yang berkelanjutan untuk kemajuan pembangunan Sidoarjo menjadi lebih baik,” ujar Subandi.

Pimpinan daerah akan memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus PKDI Sidoarjo untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan peran kepala desa terhadap

program-program pembangunan desa.

“Saya akan mendukung penuh setiap peran dan fungsi kepala desa untuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan daerahnya. Dengan bekerja sesuai aturan yang ada, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Dan saya harap terwujudnya PKDI ini, para kepala desa menjadi lebih solid, mensupport seluruh program maupun kebijakan

pemerintah,” pungkasnya.

Ketua DPC PKDI Sidoarjo Budiono di sela-sela acara itu mengatakan pentingnya peran kepala desa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan melalui rapat dewan pimpinan pusat (DPP).

“Dan yang terpenting seluruh kepala desa harus loyal dan komitmen bahwa instruksi kebijakan keputusan rapat dewan pimpinan pusat dan daerah DPC Sidoarjo harus ditaati karena hasil kebijakan keputusan tersebut tentu berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” ujarnya.

Dikatakan, perangkat desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. Mereka adalah jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tingkat desa.

Perangkat desa melibatkan diri dalam semua aspek pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Melalui partisipasi aktif perangkat desa dalam semua tahapan pembangunan, desa dapat mengalami perubahan yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. (md/rus)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim



DAMKAR BPBD SIDOARJO

JUMBO: Petugas Damkar Pos Krian berhasil mengamankan ular di Desa Sidomojo, Krian pada Selasa (22/4).

Damkar Evakuasi Ular Sanca 4 Meter dari Selokan

SIDOARJO – Warga Dusun Tundungan, Desa Sidomojo, Kecamatan Krian tiba-tiba dikejutkan adanya ular sanca berukuran besar melintas di jalan kampung dan masuk selokan pada Selasa (22/4). Ular pun diamankan.

Yaumil, warga yang melihat ular itu langsung menghubungi Damkar Pos Krian. "Regu 3 Tim Rescue Damkar Pos Krian dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan," kata Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli.

Evakuasi berlangsung cukup menegangkan. Terlebih, ular sanca yang bersembunyi di selokan itu memiliki panjang empat meter. Petugas membutuhkan waktu hampir dua jam untuk mengevakuasi ular tersebut dari selokan. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Komisi C DPRD Sidoarjo Dukung Pembangunan RSUD Sedati

Facilitas Kesehatan Warga
Wilayah Timur dan Utara

Sidoarjo, Memorandum

Pemkab Sidoarjo bakal membangun RSUD di Sedati. Pertengahan tahun ini fisik RSUD baru itu bakal digarap dan diperkirakan tuntas akhir tahun ini juga.

Pembangunan RSUD Sedati ini mendapat dukungan dari Komisi C DPRD Sidoarjo. "Bukan hanya kita dukung, tetapi juga kita kawal agar proyek pembangunan RSUD Sedati sesuai rencana dan tidak molor," ujar Ketua Komisi C H Choirul Hidayat.

Mantan Kepala Desa (Kades) Lebo itu menyebutkan, pembangunan RSUD Sedati harus didukung untuk melayani kesehatan warga di kawasan utara dan timur Sidoarjo. Setelah beroperasi, warga di kawasan itu diharapkan tidak perlu jauh-jauh lagi apabila membutuhkan pelayanan kesehatan.

Agar pembangunan tidak serampangan, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, Komisi C akan mengawasinya. Pembangunannya tidak boleh melenceng dari rencana dan sesuai yang sudah direncanakan pemkab. "Kita akan kawal mulai awal hingga

akhir agar sesuai rencana," tegas Choirul Hidayat.

Choirul Hidayat juga memaparkan dewan juga mendukung penganggaran pembangunan RSUD Sedati Rp 60 miliar melalui dinas kesehatan dari APBD Sidoarjo. Sebab pada prinsipnya wakil rakyat selalu mendukung pembangunan untuk rakyat.

Dukungan pembangunan RSUD Sedati juga datang dari Wakil Ketua Komisi C H Anang Siswandoko. Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, pembangunan RSUD Sedati jelas didukung dewan karena tujuannya untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan bagi warga.

Sebelumnya, kata Anang Siswandoko, Pemkab Sidoarjo sudah menuntaskan pembangunan RSUD Krian yang belakangan diberi nama RSUD Sidoarjo Barat (Sibar). RSUD Sibar melengkapi RSUD Sidoarjo yang lebih dulu ada dan dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan warga Sidoarjo Barat. "Sekarang kalau dibangun RSUD Sedati, ya pasti kita dukunglah. Ini semua kan



Ketua Komisi C
H Choirul Hidayat.



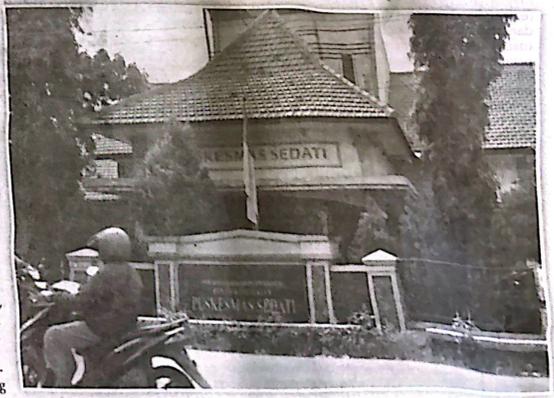
Wakil Ketua Komisi C
H Anang Siswandoko.

untuk warga Sidoarjo," jelas Anang Siswandoko.

Hanya saja, Anang Siswandoko mengingatkan Pemkab Sidoarjo dan rekanan yang menggarap proyek RSUD Sedati itu tidak dilakukan serampangan. "Agar pembangunannya sesuai rencana, kita akan mengawal dan mengawasinya," jelasnya.

Masih kata Anang Siswandoko, pihaknya akan sidak ke lapangan saat proyek itu digarap. Bila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan memanggil para pihak terkait untuk *hearing*. "Intinya proyek itu harus tepat dan tidak boleh melenceng. Kita akan mengawal sampai akhir," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan,



Puskesmas Sedati yang bakal berdampingan dengan RSUD Sedati.

Pemkab Sidoarjo memastikan pembangunan RSUD Sedati berjalan sesuai jadwal. Setelah melalui tahap *feasibility study* (FS) dan lelang manajemen konstruksi (MK), proyek siap dikerjakan pertengahan tahun ini.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sidoarjo, Danang Abdul Ghani kepada wartawan mengatakan, lelang MK selesai dilakukan. Pihaknya menargetkan pembangunan fisik rampung akhir 2025. "Pertengahan tahun ini pembangunan akan dimulai, dan bisa selesai akhir tahun," ujarnya.

Setelah fisik bangunan selesai, tahap berikutnya adalah pengadaan alat kesehatan (alkes) dan perekrutan tenaga me-

di. "Time schedule-nya sudah ada, jadi semuanya berjalan sesuai rencana, 2026 kita lengkapi alkes dan dokter serta perawat," jelasnya.

Meskipun lahan Puskesmas Sedati digunakan untuk RSUD, layanan puskesmas tetap dipertahankan. Puskesmas Sedati nantinya akan difokuskan pada bangunan baru di sisi utara yang berdampingan dengan RSUD.

Dengan lokasi yang berdampingan, diharapkan ada sinergi antara layanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Hal itu cukup penting untuk meningkatkan akses layanan medis bagi warga Kecamatan

Gedangan, Sidoarjo, Waru, hingga Sedati.

"Pembangunan RSUD Sedati ini kami harapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sidoarjo, dengan besitas dan tenaga medis yang memadai, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih optimal."

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Tersandung Persoalan Hukum, Pengembang Perumahan di Sidoarjo Mencari Keadilan ke DPRD

23 April 2025 13:13 WIB - 115 Dilihat

oleh redaksi



Ketua komisi A DPRD Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin bersama Eko Budi Santoso Owner PT. Kenongo Properti memberi keterangan media

Sidoarjo, petisi.co – Merasa dirugikan atas legalitas tanah yang telah dibeli di Dusun Klanggri Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Sidoarjo, Eko Budi Santoso Owner PT. Kembang Kenongo Property menumpahkan seluruh keluhan kesah yang membelenggu pikirannya di hadapan Komisi A, DPRD Sidoarjo, Selasa (22/4/2025).





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dalam acara rapat hearing bersama sejumlah pihak tersebut, Eko mengaku telah membeli tanah seluas 4.420 meter persegi atas nama H. Sholeh P. Kambali dengan dokumen kepemilikan surat letter C, senilai Rp. 2,4 miliar. Keabsahan surat dokumen tanah yang dibelinya di tahun 2021 itu juga diperkuat dengan hadirnya sejumlah saksi.

"Saya meyakini tanah yang saya beli bukan Tanah Kas Desa (TKD), karena ada dokumen resmi dari pihak desa, termasuk ada pernyataan dari lurah bahwa tanah yang dijual tidak dalam sengketa. Saya juga tidak mungkin berani membeli kalau tidak ada bukti legalitas seperti Letter C atas nama ahli waris dan keterangan dari pihak desa serta saksi-saksi waktu akad jual beli," tegas Eko, didampingi 3 pengacaranya.

Tanah itu kemudian dibangun menjadi kawasan hunian sekitar 52 unit rumah. Namun, setelah proyek berjalan dan rumah mulai ditempati, muncul klaim bahwa sebagian tanah tersebut merupakan milik desa. Hal ini menimbulkan polemik yang berujung pada pelaporan hukum, hingga menyeret kepala desa setempat ditahan atas dugaan korupsi terkait kepemilikan lahan.

"Maksud dan tujuan saya dipertemukan di Komisi A DPRD Sidoarjo dengan pihak terkait mulai dari perangkat desa, instansi pemerintah dalam hal ini BPN dan Badan Aset Negara serta warga Desa Sidokerto selaku ahli waris untuk mencari keadilan. Karena saya sangat dirugikan dalam permasalahan ini," beber Eko.

Ia menyebut buntut dari polemik legalitas tanah yang tak kunjung ada kejelasan tersebut membuat para pembeli rumah enggan membayar angsuran kepada pengembang. Selain persoalan kredit cicilan rumah macet, proyek pembangunan perumahan juga mandeg. Sehingga developer menjadi pihak yang paling dirugikan.

"Sudah setahun terakhir, para user (pembeli rumah) sama sekali gak ada yang mengangsur. Untuk bisa dapat kunci rumah, user ini hanya bayar awal DP (Down Payment) Rp. 100 juta itu saja,. Setelah itu rumah ditempati dan tidak ada yang bayar cicilan karena adanya persoalan ini," aku Eko dengan raut wajah sedih.



Merespon permasalahan ini, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin menyampaikan kasus tersebut masih dalam proses peradilan. Pemerintah daerah, bersama instansi terkait, telah melakukan penelusuran dan verifikasi dokumen guna membantu proses hukum yang sedang berjalan.

"Untuk bisa menemui titik terang dalam permasalahan ini, semua mohon bersabar. Kita nantikan saja, karena kasus tersebut masih dalam proses peradilan. Ini tadi semua pihak sudah kita hadirkan, baik dari instansi terkait hingga perangkat desa untuk menyampaikan data serta fakta-fakta yg ada untuk dijadikan bahan Pak Eko dalam persidangan," beber wakil rakyat yang akrab dipanggil dengan sebutan Gus Rizza.

Menurutnya kasus yang sedang berjalan ini, bisa menjadi catatan pelajaran bersama bagi semua pihak, utamanya masyarakat agar selalu berhati-hati saat ingin berinvestasi dalam bentuk properti di Kabupaten Sidoarjo.

"Kondisi di lapangan (perumahan) terkadang secara faktual menarik begitu adanya. Tetapi secara administrasi kadang tidak sesuai. Ini menjadi cermin bagi masyarakat agar lebih teliti dan berhati-hati dalam investasi properti terutama obyek tanah di Kabupaten Sidoarjo," tuturnya.

Rizza memastikan pemerintah akan hadir dalam menyikapi hasil putusan pengadilan terkait nasib para warga yang terlanjur membeli unit hunian diatas tanah bermasalah.

"Kita masih menunggu karena ini belum putusan pengadilan. Nanti setelah ada putusan baru bisa kita sikapi bersama. Kita akan terus mengawal kasus ini, agar ada kejelasan status hukum, terutama bagi para user," pungkasnya. *(luk)*





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



UMKM: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengajak rombongan tamu mengunjungi salah satu sentra pembuatan kue lumpur.

Kenalkan Kuliner Khas saat Terima Kunjungan Komisi A DPRD Kota Malang

KOTA-Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Kota Malang di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Rabu pagi (23/4). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Lelly Thresiyawati, bersama jajaran anggota DPRD lainnya.

Pertemuan tersebut membahas pelayanan administrasi kependudukan yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sidoarjo. Khususnya terkait pelayanan terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo.

Mimik menyampaikan bahwa Pemkab Sidoarjo terus meningkatkan kualitas layanan kependudukan melalui inovasi dan integrasi sistem.

"Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah,

cepat, dan tepat bagi masyarakat. Di MPP, masyarakat bisa mengurus berbagai dokumen dalam satu tempat," ujarnya.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sidoarjo, Reddy Kusuma, menambahkan bahwa layanan Dukcapil Sidoarjo kini sudah berbasis digital dan terus dikembangkan.

"Kami juga menjalin sinergi dengan berbagai instansi untuk menyederhanakan proses pelayanan, sehingga masyarakat tidak lagi direpotkan," jelasnya.

Usai pertemuan, Mimik mengajak rombongan tamu mengunjungi salah satu sentra pembuatan kue lumpur, kuliner khas Sidoarjo.

"Kami ingin menunjukkan sisi lain dari Sidoarjo, termasuk kekayaan kulinernya. Kue lumpur ini salah satu kuliner

khas yang patut dijaga."

Kenalkan Kuliner...

katanya sambil menyuguhkan kue lumpur kepada para tamu.

Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Lelly Thresiyawati, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat

dan keterbukaan Pemkab Sidoarjo.

“Informasi yang kami peroleh, khususnya terkait integrasi layanan Dukcapil, sangat bermanfaat dan akan kami jadikan referensi untuk diterapkan di Kota Malang,” ungkapnya. (sai/vga)

Harga Kedelai Impor Naik, Pengusaha Tahu Kurangi Porsi Produksi

TAMAN-Kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku utama tahu membuat para pengusaha di Taman, kelimpungan. Salah satunya adalah Sunardi, pemilik usaha tahu di Jalan Kedungboto, Desa Kedungboto, Kecamatan Taman.

Harga kedelai impor yang sebelumnya stabil di kisaran Rp 8.000 per kilogram kini melonjak drastis hingga menembus Rp 10.800 per kilogram. Kondisi ini memaksa pelaku usaha seperti Sunardi untuk menyiasati produksi agar tetap bertahan.

"Sekarang per kilonya naik antara Rp 2.000 sampai Rp

2.800. Ada yang Rp 10.200, Rp 10.500, sampai Rp 10.800 tergantung jenisnya," ujar Sunardi saat ditemui Radar Sidoarjo, Rabu (23/4).

Kenaikan harga tersebut membuat Sunardi terpaksa mengurangi porsi tahu yang diproduksi maupun dijual. Ia khawatir jika menaikkan harga, konsumen justru enggan membeli.

"Kalau harga jual dinaikkan, pembeli makin sepi. Jadi sementara ini porsi saya yang dikurangi," jelasnya.

Dalam sehari, Sunardi membutuhkan sekitar 1,2 ton kedelai impor, yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. Ia

mengaku sulit mengandalkan kedelai lokal karena ketersediaan terbatas dan kualitasnya masih di bawah kedelai impor.

"Kedelai lokal sekarang jarang dan tidak sebanyak dulu. Panennya sebentar, dua bulan sudah habis. Kualitasnya juga kalah bersih dibanding impor," imbuhnya.

Usaha tahu milik Sunardi sudah berjalan sejak 2009. Ia bahkan pernah menghadapi situasi serupa ketika krisis moneter, saat harga kedelai sempat menyentuh Rp 12.500 per kilogram. Namun, kali ini ia bersyukur kenaikan harga belum berdampak pada jum-

lah tenaga kerja.

"Produksi mulai jam 06.30 sampai 16.00. Alhamdulillah, sampai sekarang masih bisa mempertahankan 12 karyawan, semua dari warga sekitar," terangnya.

Tahu hasil produksinya sebagian besar didistribusikan ke wilayah Surabaya. Sunardi berharap harga kedelai segera kembali stabil agar usahanya bisa terus berjalan.

"Harapannya semoga harga bisa turun lagi supaya penjualan stabil. Sekarang ini naiknya tiap hari, jadi sulit menentukan harga jual yang pas," pungkasnya. (dik/vga)



MELONJAK: Proses produksi tahu dari awal hingga akhir di Desa Kedungboto, Kecamatan Taman, Rabu (23/4).

RADAR
SIDOARJO.ID



BERISIKO: Tembok bangunan d terlihat miring dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Tembok Miring di Pucang Bahayakan Pengguna Jalan

Warga Minta Ada Penanganan

KOTA-Belasan warga Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, mendatangi kantor kelurahan pada, Rabu (23/4). Tujuannya untuk menyampaikan keluhan mereka terkait kondisi tembok bangunan miring yang dinilai membahayakan. Warga mendesak adanya penanganan segera dari pihak kelurahan dan instansi terkait.

Koordinator aksi yang juga Ketua RT 05 RW 02, Mustoha, mengatakan bahwa tembok tersebut sudah lama menjadi kekhawatiran warga. Letaknya yang berada di tepi jalan kerap dilalui kendaraan bermotor membuat situasinya semakin berisiko.

"Kalau ada motor lewat pasti waswas, karena posisi tembok sudah sangat miring, seperti mau roboh," ujarnya saat ditemui Radar Sidoarjo.

Kekhawatiran semakin besar pada malam hari, mengingat

penerangan di sekitar lokasi tergolong minim. Kondisi makin rawan jika turun hujan atau ada kendaraan berat melintas, karena getaran bisa memicu robohnya tembok.

"Kalau hujan deras atau dilintasi kendaraan berat, tembok itu bisa langsung ambruk. Ini sangat membahayakan," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Pucang, Yuargono, mengaku telah menerima laporan dari warga dan tengah berupaya mencari solusi ter-

baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun.

"Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari jalan keluar yang tepat," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa status kepemilikan bangunan tersebut masih belum jelas. Tembok itu merupakan bagian dari sebuah bangunan yang pernah dijaminkan ke bank. Namun, pemiliknya mengalami pailit dan bangunan tak pernah ditempati.

● Ke Halaman 10

RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tembok Miring...

"Bangunan itu belum pernah dihuni karena pemiliknya pailit. Saat ini, kami masih menelusuri siapa pemilik sahnya," terangnya.

Karena status hukum bangunan belum jelas, pihak kelurahan belum dapat melakukan pembongkaran. Langkah tersebut dinilai berisiko menimbulkan masalah hukum baru. Sebagai alternatif, pihak kelurahan mempertimbangkan

opsi penguatan fisik dari luar. "Kami berencana memasang penyangga besi dari luar, agar jika tembok roboh, tidak langsung menimpa pengguna jalan atau warga sekitar," pungkash Yuargono. (sai/vga)



Kuatkan Pendidikan Agama, Bupati Dorong Sidoarjo Jadi Kota Santri

KOTA-Bupati Sidoarjo Subandi, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kota Delta sebagai kota santri. Ia menyatakan siap membangun masyarakat berkarakter Islami melalui penguatan pendidikan agama, khususnya pendidikan pesantren.

Pernyataan tersebut disampaikan Subandi saat menghadiri kegiatan halalbihalal Majelis Taklim Az-Zahra di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (23/4).

"Sidoarjo perlu memiliki identitas keislaman yang kuat, karena mayoritas warganya berlatar belakang muslim," ujarnya.

Menurut Subandi, karakter Islami masyarakat Sidoarjo telah tumbuh dan berkembang

melalui berbagai organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII. Karena itu, pendidikan pesantren perlu mendapatkan perhatian dan dukungan serius dari pemerintah.

Pemkab Sidoarjo, lanjut Subandi, akan mempermudah proses perizinan bagi lembaga pendidikan pesantren agar tumbuh lebih banyak dan berkualitas.

"Langkah ini kami harapkan bisa mendorong peningkatan jumlah dan kualitas pesantren di Sidoarjo," katanya.

Tidak hanya pendidikan di pesantren, Subandi juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Ia menekankan

bahwa pembelajaran agama sangat penting dalam membentuk generasi muda yang religius dan toleran.

Ia menambahkan, semangat kota santri harus didukung oleh aktivitas pesantren yang aktif serta ketersediaan fasilitas keagamaan yang memadai. Masyarakat pun diminta untuk ikut mendukung dan menjaga kegiatan keagamaan di lingkungan masing-masing.

"Bukan hanya soal jumlah pesantren, tapi bagaimana karakter Islami yang kuat bisa tumbuh di tengah masyarakat. Itu penting agar Sidoarjo menjadi kota yang ramah, toleran, dan peduli terhadap sesama," pungkashnya. (sai/vga)



M. SAIFUL ROMAN/RADAR SIDOARJO
Bupati Sidoarjo Subandi.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi A DPRD Sidoarjo Siap Perhatikan Nasib 52 Pembeli Rumah dan Pengembang Perumahan Griya Sono Indah

by redaksiWD | 23/04/2025 | 00:47

SHARE



Hearing dengan pihak pengembang dan penghuni Perumahan Griya Sono Indah bersama instansi terkait di Gedung Paripurna Kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (23/4/2025).

SIDOARJO (wartadigital.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo khususnya Komisi A siap memperhatikan kelanjutan kasus status tanah Perumahan Griya Sono Indah Sidokerto Buduran Sidoarjo.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H Rizza Ali Faizin MPd.I usai melakukan hearing dengan pihak pengembang dan penghuni Perumahan Griya Sono Indah bersama instansi terkait di Gedung Paripurna Kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (23/4/2025).

"Kasus ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kami agar para investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami masalah seperti ini. Kami juga akan memperhatikan para pembeli atau pemilik rumah di Griya Sono Indah untuk mendapatkan hak-nya," ungkap Rizza.



Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan hearing kali ini tidak bisa memutuskan apa status tanah tersebut karena yang bisa memutuskan adalah Pengadilan, apalagi kasus ini sudah masuk ke ranah hukum baik perdata maupun pidananya. Untuk itu, yang bisa dilakukan adalah mempertemukan semua pihak yang berkaitan dengan tanah yang telah dibangun Perumahan Griya Sono Indah ini agar informasi bisa didapat dengan utuh, lengkap, dan sebenarnya. Hasil dari hearing ini juga bisa disampaikan ke Pengadilan sehingga bisa menjadi sumber informasi yang sangat penting dan Pengadilan bisa memberikan keputusan terbaik.

Di tempat yang sama, Kuasa Hukum dari Pembeli Tanah, Budi menjelaskan sebelum membeli tanah tersebut, Direktur dari pengembang Perumahan Griya Sono Indah yaitu Eko sudah melakukan pengecekan status tanah yang akan dibeli.

"Klien saya membeli tanah tersebut dengan dasar kepemilikan petok D no 405 dan surat dari Pemerintah Desa pada tahun 1982 yang merupakan surat keterangan waris akan tanah tersebut dengan saksi kepala desa dan Pak Camat. Selain itu klien saya melakukan jual beli tanah dengan notaris yang sudah terverifikasi," papar Budi.

Kuasa Hukum Eko, Iskandar Laka menjelaskan bahwa surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat adalah kuat secara hukum. "Surat tersebut sah secara hukum dan hanya surat pengadilan yang menggugurkan surat tersebut," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Desa Sidokerto Hermanto menjelaskan tanah TKD Desa Sidokerto sudah tidak berada di Desa Sidokerto karena sudah ditukar guling ke wilayah Tarik dan Desa Banjar Panji Kecamatan Candi. "Desa Sidokerto sudah tidak memiliki tanah kas desa di Desa Sidoarjo. Kami memiliki tanah kas desa yang berada di luar Desa Sidoarjo yaitu di Tarik dan Banjar Panji," ungkapnya.

Sementara itu, Eko selaku pembeli dan pengembang Perumahan Griya Sono Indah mengatakan bahwa sudah lebih dari satu tahun ini para user atau pembeli rumah tidak lagi melakukan pembayaran atas pembelian rumah yang sudah mereka tempati selama kurang lebih dua tahun terakhir.

"Kami harapkan pemerintah bisa hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini karena kami tidak akan mungkin melakukan pembelian tanah dan membangun kompleks perumahan di atas tanah bermasalah. Mohon DPRD Sidoarjo bisa segera membantu kami dan semua user bisa kembali tenang dan segera mendapatkan hak mereka yaitu surat hak milik (SHM) atas tanah dan rumah yang telah dibeli," tuturnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Acara rapat hearing dihadiri juga Bambang Riyoko SE, Mohamad Rafi Wibisono, Elok Suciati SH, Rizal Fuady SE. Hadir dari BPN Kab Sidoarjo, dari Badan Aset Negara dan perwakilan warga Desa Sidokerto. sis

